



Anggota Parlemen ASEAN Mendorong Ulang Penyelidikan Kekerasan di Negara Bagian Rakhine

JAKARTA, 15 November 2016 – Para anggota parlemen dari seluruh Asia Tenggara saat ini mendorong kembali untuk dilaksanakannya penyelidikan independen yang kredibel dalam dugaan pelanggaran hak asasi di negara bagian Rakhine Myanmar menyusul eskalasi kekerasan di bagian utara negara selama akhir pekan.

"Dalam beberapa hari terakhir, kami telah mendengar meningkatnya laporan kekerasan dan melihat bukti yang lebih kuat dari laporan kekejaman dan pembunuhan warga sipil Rohingya serta gambar desa yang terbakar. Tanpa akses, laporan-laporan memilukan ini tidak mungkin untuk diverifikasi, namun sejarah panjang militer Myanmar terkait pelanggaran hak asasi manusia telah merusak kredibilitas mereka karena terus memberitahu kita bahwa pelanggaran ini tidak terjadi," kata Charles Santiago, anggota Parlemen Malaysia dan Ketua Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR).

"Jika pemerintah Myanmar tidak mampu mencegah pertumpahan darah lebih lanjut atau mengendalikan pasukan keamanan, maka itu adalah tanggung jawab dari masyarakat regional dan internasional untuk bertindak. PBB, serta ASEAN, harus turun tangan untuk memimpin penyelidikan."

Menurut [media pemerintah](#), kekerasan meningkat pada hari Jumat ketika pasukan militer Myanmar disergap oleh "penyerang" di Kota Maungdaw dan militer menanggapi dengan serangan udara dari helikopter. Kekerasan baru datang lebih dari sebulan setelah pasukan keamanan Myanmar menutup akses ke Negara bagian Rakhine utara menyusul serangan terhadap pos pemeriksaan polisi di daerah oleh penyerang tak dikenal.

Pada hari Minggu, Human Rights Watch [menerbitkan citra satelit baru](#) menunjukkan kerusakan yang terkait dengan kebakaran skala besar desa Rohingya. rekaman video yang belum diverifikasi korban Rohingya juga telah menyuarakan keprihatinan. Sebuah "tim informasi publik" dari militer Myanmar membantah kebenaran bukti yang disajikan, tapi anggota parlemen mengatakan ini hanya lebih lanjut menunjukkan perlunya lebih banyak akses.

Para anggota parlemen juga menyerukan Kanselor Negara Myanmar Aung San Suu Kyi, yang sebagian besar tetap diam selama peristiwa ini, untuk campur tangan.

"Kami memahami tekanan besar dan sensitivitas seputar isu-isu di negara bagian Rakhine dan pemisahan institusional kekuasaan antara militer dan kepemimpinan sipil, tapi kami mohon pemerintahan Aung San Suu Kyi yang juga merupakan pemenang Nobel untuk

memprioritaskan upaya untuk mengatasi situasi ini dan akar penyebabnya sebelum terlambat,"kata Santiago.

"Negara-negara anggota ASEAN harus ingat bahwa apa yang terjadi di negara bagian Rakhine mempengaruhi lebih dari sekedar Myanmar. Kekerasan ini bukan 'urusan dalam negeri,' tapi situasi dengan jelas daerah implikasi-implikasi yang kita telah sayangnya terlihat sebelumnya. Agar ASEAN untuk hidup sesuai dengan komitmen yang dibuat dalam Deklarasi Melawan Perdagangan Manusia (Declaration Against Trafficking in Persons), wilayah tersebut harus mengambil tindakan untuk mengatasi akar penyebab yang dapat menyebabkan orang menjadi korban trafficking, termasuk penganiayaan dan kekerasan yang disponsori negara."